

**POLA KADERISASI POLITIK MELALUI SAYAP PARTAI PEREMPUAN
(Studi Kasus Perbandingan Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Nasional
Demokrat (NasDem) Kota Semarang)**

Wahyu Herryansyah Putra

wahyuhputra09@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

ABSTRAK

Partai Politik (parpol) mempunyai posisi dan peranan sangat penting dalam system demokrasi, sehingga rekrutmen dan kaderisasi Partai politik menjadi fungsi strategis dalam membesarkan nama Partai Politik dan meningkatkan jumlah anggota. Kaderisasi politik dilakukan Parpol kepada anggota dan bukan anggota (Harris, 2016). Kepada anggota atau penguatan secara internal dilakukan melalui konsolidasi internal partai, sementara untuk perluasan basis massa pada eksternal partai dapat melalui organisasi sayap (underbow partai politik). Peran organisasi sayap ini sebagai jembatan bagi Parpol untuk menjangkau seluruh golongan masyarakat baik itu pemuda, buruh, perempuan maupun kelompok pekerjaan yang notabene merupakan sumber massa. Peneliti tertarik untuk mengangkat peran sayap partai perempuan pada dua Parpol, yakni Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan yang keduanya punya sayap partai perempuan yaitu Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) dan Garda Wanita Malahayati dari Partai NasDem. Penelitian ini menduga setiap Parpol mempunyai pola kaderisasi sesuai dengan sistem pemikiran dan strategi yang dikembangkan oleh masing-masing Parpol.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses kaderisasi anggota partai perempuan yang dijalankan oleh Partai Golkar dan dan Partai NasDem Kota Semarang melalui sayap partai perempuan serta hambatan yang didapatkan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kaderisasi tidak berpola, kemudian ditemukan kemiripan dalam proses kaderisasinya, dimana kewenangan fungsi kaderisasi oleh sayap partai perempuan lebih difokuskan pada upaya memperluas anggota, fungsi kaderisasi utama pada Partai Golkar dan Partai NasDem oleh organisasi induk dan kaderisasi oleh sayap partai perempuan sebagai pelengkap tidak terstruktur. Hambatan sayap partai perempuan dalam melaksanakan fungsi kaderisasi berpangkal pada terbatasnya wewenang. Kaderisasi oleh Partai Golkar dan Parta NasDem Kota Semarang, termasuk oleh sayap partai perempuan berjalan tidak maksimal, sehingga gagal mengantarkan perolehan kursi yang signifikan dan gagal mengantarkan keterpilihan perempuan pada Pemilu Kota Semarang. Penelitian ini merekomendasikan untuk penelitian lanjutan di lokasi yang berbeda.

Kata Kunci: Kaderisasi Politik, Sayap Partai Perempuan, Partai Golkar. Partai NasDem

**Pattern of Political Caderization Through the Women Party Wings
(Case Study of Comparative Golkar Party and NasDem Party in Semarang City)**

Wahyu Herryansyah Putra

wahyuhputra09@gmail.com

Department of Governmental Science

Faculty of Social and Political Sciences Diponegoro University

ABSTRACT

Political parties have a very important role and role in a democratic system, so that the recruitment and caderization of political parties has become a strategic function in increasing the name of political parties and increasing the number of members. Political caderization is carried out by political parties to members and not members (Harris, 2016). The internal caderization for the political party member is carried out by party itself, while for the expansion of the mass base external to the party can be done by the party wings (political party underbows). The role of the party wings is as a bridge for Political Parties to reach all groups of society, including youth, women and others occupation group, who are the party masses sources. Researchers are interested to study the role of women party wings in the Golongan Karya Party (Golkar) and the National Democratic Party (NasDem) to political caderuzation. The namely the wings party are Golkar Party Women's Union (KPPG) and the Malahayati Women's Guard (Garda Wanita Malahayati) from the NasDem Party. Research based on think every political party has a caderization pattern or system in accordance with the thought system and strategy developed by each political party.

This study aims to explain the process of caderization female party members carried out by the Golkar Party and NasDem Party in Semarang City through the women party wings and the barriers they face. This study uses primary and secondary data sources. Data methods used are interviews and documentation. The data analysis method used was qualitative data analysis.

The results showed that the cadre process was not patterned, then similarities were found in the both parties cadre process, where the authority of the political caderization function by womens party wings was more focused on efforts to expand members. The other hand, the main political caderization function by the Golkar Party and the NasDem Party itself. Women party wings held caderization role which are unstructured. The obstacles to the women party wings in carrying out its caderization function stems from its limited authority. The political caderization by the Golkar Party and the NasDem Party of Semarang City, including by the women party wings was not running optimally, so it failed to gain significant seats and failed to deliver women's electability in the 2019 Semarang City Election. This study recommends further research in other areas.

Keywords: Political Caderization, Women Party Wings, Golkar Party, NasDem Party

I. PENDAHULUAN

Partai politik (Parpol) mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam sistem demokrasi, karena dalam sistem demokrasi kekuasaan berada di tangan rakyat, dan rakyat yang memegang kekuasaan tidak mungkin menjalankan kekuasaan tersebut secara langsung, melainkan melalui lembaga perwakilan yang dibentuk dengan pemilihan umum (Pemilu), yang peserta Pemilunya adalah Parpol.

Rekrutmen dan kaderisasi Parpol menjadi fungsi strategis dalam membesarkan nama parpol, melalui fungsi ini Parpol mencari dan memperluas anggota dan mencetak kader potensial dari anggotanya untuk disiapkan sebagai pengurus Parpol, jabatan publik di legislatif maupun pemerintah yang berkualitas. Ini merupakan asumsi dasar konsep rekrutmen dalam konteks sistem politik demokrasi. Melalui kaderisasi politik, individu dipersiapkan menjadi calon pemimpin yang tidak hanya untuk kepentingan partainya tapi juga untuk kepentingan rakyat. Partai politik yang mempunyai kader-kader partai yang berkualitas, diasumsikan tidak akan kesulitan dalam menentukan pemimpinnya dan mempunyai kesempatan untuk mengajukan kader yang berprestasi sebagai calon pemimpin pemerintahan yang baik, amanah, yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Berdasar hal ini, diasumsikan semua Parpol akan melakukan memperluas anggota dan menyiapkan kader, termasuk melalui organisasi sayap yang merupakan kepanjangan tangan Parpol.

Keberadaan organisasi sayap Parpol di Indonesia secara legal baru dijamin negara dengan UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 12 Ayat (10) yang menyatakan bahwa “Salah satu hak partai politik adalah membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik”. Pengakuan dan jaminan yuridis ini merupakan dasar sekaligus peluang bagi pengembangan struktur partai untuk menjangkau seluruh segmen masyarakat.

Berdasarkan telaah Pandiangan (2015) atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) masing-masing organisasi sayap Partai politik Peserta Pemilu 2014, ditemukan secara umum organisasi sayap punya fungsi melakukan kaderisasi, yang menunjukkan bahwa organisasi sayap menjadi salah satu pintu bagi seorang kader dilatih bagaimana membangun sistem politik yang baik dan militan untuk mampu bersaing secara kapasitas intelektual dan memiliki visi yang jelas sesuai dengan platform partai politik. Kata lain, organisasi sayap diberi peran sebagai salah satu pintu kaderisasi partai.

Penelitian ini berfokus pada pola kaderisasi politik oleh Partai Golkar dan Partai NasDem Kota Semarang melalui sayap partai perempuan dan hambatan yang dihadapi oleh

sayap partai perempuan Partai Golkar dan Partai NasDem Kota Semarang dalam kaderisasi politik.

II. LANDASAN TEORI

Kaderisasi Partai Politik

UU No. 2 Tahun 2008 jo UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, disebutkan bahwa partai politik adalah “Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warganegara Indonesia secara suka rela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Triwidaryanta (2008:13), kaderisasi adalah proses mencari bibit- bibit unggul dari anggota partai politik melalui kegiatan sistematis, berkelanjutan dan terarah berkaitan dengan senang hati akan terlibat mencurahkan segenap potensinya dalam kancah organisasi. Kaderisasi bisa dibidang sebagai suatu ajang pendidikan kader untuk mengetahui dan mengembangkan potensi individu para kader dengan cara menanamkan ide serta mentransfer pengetahuan, agar dapat memunculkan kader-kader yang siap dan tangguh dalam menghadapi dinamika politik, juga memenuhi kebutuhan regenerasi kepemimpinan dan kepengurusan untuk mempertahankan eksistensi organisasi.

Haris et al (2016: 50) kaderisasi lebih bersifat sebagai suatu internalisasi partai politik dalam melakukan peningkatan kapabilitas para kader untuk menjalankan tugas-tugas partai sebagai fungsionaris, sehingga para kader mampu menjalankan amanat yang ditugaskan oleh partai baik dalam menjadi pengurus maupun menjadi pejabat public ditingkat pusat maupun tingkatan daerah. Kaderisasi partai politik pun menjadi sarana memproduksi kepengurusan dan kepemimpinan periode lanjutan dari organisasi tersebut.

Haris et al (2016: 52) kaderisasi partai politik dapat dilakukan dengan baik hanya jika dalam proses tersebut berlaku prinsip-prinsip, yaitu terbuka, prinsip terbuka ini mengandung arti bahwa proses kaderisasi harus dapat diikuti oleh semua anggota partai politik, dan non-diskriminatif, bahwa pemberian akses yang sama dalam proses kaderisasi, dan juga berjenjang, penjenjangan kaderisasi partai politik didasarkan pelapisan yang bertahap, bertingkat atau piramidal.

Menurut Haris *et al* (2016: 52) kaderisasi partai politik dapat dilakukan dengan baik hanya jika dalam proses tersebut berlaku prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Terbuka, prinsip terbuka ini mengandung arti bahwa proses kaderisasi harus dapat diikuti oleh semua anggota partai politik, artinya anggota partai politik memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelatihan (training) dan kegiatan-kegiatan yang lainnya dalam proses kaderisasi. Prinsip terbuka ini sangat penting untuk para anggota partai politik karena hak bagi seluruh kader partai yang tergabung untuk mendapatkan pengajaran dan nilai yang sama sebagai satu kesatuan keluarga partai politik. Akan jadi hal yang berbeda jika kaderisasi tidak memiliki prinsip yang terbuka karena partai hanya akan mengalami konflik internal yang akan merusak partai itu dengan sendirinya. Karena ada kemungkinan pilih kasih atau anak emas yang nantinya membuat kecemburuan antar satu kader dan yang lainnya.
2. Non-Diskriminatif, pemberian akses yang sama dalam proses kaderisasi juga sekaligus berarti bahwa mekanisme kaderisasi juga membuka ruang yang sama untuk seluruh anggota untuk mengikuti dan/atau mendapatkan promosi dan karier politik melalui proses kaderisasi tanpa membedakan warna kulit, golongan, agama, gender, serta suku. Prinsip ini juga penting sama seperti yang dijelaskan pada point sebelumnya karena semua memiliki kesempatan yang sama besar tanpa melihat suku, agama, dan ras. Jika kaderisasi yang dilakukan bersifat diskriminatif, maka orang-orang akan memandang sebelah partai tersebut.
3. Berjenjang, penjenjangan kaderisasi partai politik didasarkan pelapisan yang bertahap, bertingkat atau piramidal. Ini misalnya bisa disusun dengan melakukan penjenjangan kaderisasi tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat lanjut atau penyebutan lainnya. Perjenjangan ini bermanfaat dalam mempertajam para kader

mengenai nilai-nilai dan visi yang dibawa oleh partai agar menjadi kader yang terbaik yang bisa menempatkan posisi jabatan di partai ataupun dipemerintah sesuai dengan jenjang yang sudah dilalui, tentu semakin tinggi jenjang maka semakin tinggi posisi yang mungkin bisa di raih oleh kader tersebut.

Sayap Partai Politik

Haris et al (2016: 54) Organisasi sayap merupakan sebuah organisasi bagian dari partai politik yang akan membantu kinerja partai politik dalam menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Pasal 12 ayat (10) menyatakan bahwa salah satu hak partai politik adalah membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik.

Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat (10) “Partai politik Membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik”. Sebagaimana dengan maksud ayat tersebut, maka fungsi organisasi sayap partai politik yaitu mendidik masyarakat agar mampu memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang merupakan kebutuhan bagi peningkatan daya kritis dan partisipasi politik rakyat dalam kehidupan demokrasi, membimbing dan mendampingi serta memberikan advokasi terhadap masyarakat agar memiliki keberanian untuk menuntut dan menegakkan hak- hak politiknya.

Organisasi sayap partai politik ini menjadi sumber penting dalam melakukan rekrutmen dan kaderisasi partai politik (Haris et al, 2016: 54). Organisasi sayap yang dikembangkan dan diberdayakan oleh partai politik sebagai instrumen penting untuk menarik simpati dan dukungan yang sebesar-besarnya dari segenap lapisan masyarakat yang pada gilirannya mampu memenangkan partai dalam kompetisi politik secara elegan dan bermartabat, karena organisasi sayaplah yang selama ini bersentuhan langsung dengan masyarakat yang dapat memberikan informasi tentang keberadaan program-program partai politik, sedangkan partai politik nampak apabila ada kegiatan-kegiatan politis.

Sayap Partai Politik Perempuan

Hampir semua partai politik di Indonesia memiliki pengorganisasian khusus perempuan. Pasca diterapkannya kebijakan afirmatif untuk mendorong keterwakilan perempuan, penguatan partisipasi politik perempuan di internal partai juga dapat dilihat dari

pertama, keberadaan divisi perempuan di dalam struktur partai sebagai upaya untuk menjamin kehadiran perempuan dalam proses pembuatan keputusan, dan kedua, keberadaan organisasi sayap perempuan yang bertujuan untuk mempromosikan dan memperkuat keterwakilan perempuan.

Puskapol UI dan MPI (2017) menjelaskan bahwa ada tiga hal mengapa partai politik di Indonesia membentuk bidang khusus perempuan dalam struktur kepartaian ataupun organisasi sayap partai perempuan: Pertama, sebagai sarana untuk menjawab kebutuhan akan representasi politik perempuan. Dalam struktur kepartaian ataupun organisasi sayap partai menjadi lumbung rekrutmen partai politik secara khusus bagi perempuan yang akan mencalonkan di eksekutif maupun legislatif yang memiliki ketentuan affirmative action 30% pencalonan perempuan dalam legislatif. Kedua, institusionalisasi kepartaian dalam rangka penguatan pengakaran partai (Party rooting) terutama dikalangan penduduk dan pemilih perempuan. Ketiga, dibentuknya bidang khusus perempuan dalam struktur partai menjadi sarana agregasi sekaligus artikulasi kebijakan partai politik yang berkaitan dengan isu-isu perempuan.

III. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka, (Sudarwan Danim, 2020:51). Penelitian deskriptif berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang terjadi. Efek yang terjadi adalah kecenderungan yang sedang berkembang yang berkenaan dengan masalah ini, meskipun tidak jarang juga mempertimbangkan peristiwa masa lampau dengan pengaruh terhadap masa kini.

Penentuan informan penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono, (2008:300) teknik purposive sampling pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan bahwa penentuan informan dengan alasan orang atau informan dianggap tahu tentang apa yang sedang diteliti oleh penulis dan bersedia menjadi informan. Informan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Suryanto, Pengurus DPD Partai Nasdem Kota Semarang, saat ini menjadi anggota DPRD Kota Semarang
2. Iswanti Yuni Asih, sebagai Ketua Garda Wanita Malahayati Kota Semarang merangkap pelaksana tugas Ketua Garda Wanita Malahayati Jawa Tengah
3. Jumiyati, sebagai pengurus Garda Wanita Malahayati Kota Semarang

4. H. Anang Budi Utomo, M.Pd, Sekertaris Partai Golkar Kota Semarang, saat ini mejadi anggota DPRD Kota Semarang
5. Padmasari Mestikajati, S.IP, M.Si, Pelaksana tugas ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar Jawa Tengah, saat ini menjadi anggota DPRD JawaTengah
6. Atik Kusmiati, SH, sebagai pengurus Kesatuan Perempuan Partai Golkar Kota Semarang

Sumber data yang digunakan yaitu Sumber data primer yang termasuk klasifikasi data primer adalah hasil wawancara dengan informan yang telah di jelaskan dalam subyek penelitian. Dan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Metode Pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang. Alasan pemilihan lokasi penelitian, ditentukan dengan sengaja dengan pertimbangan wilayah Kota Semarang merupakan daerah basis pendukung terhadap Partai NasDem dan Partai Golkar.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pola kaderisasi politik oleh Partai Golkar dan Partai NasDem Kota Semarang melalui sayap partai perempuan

Terdapat sejumlah temuan terkait fungsi kaderisasi pada organisasi sayap bidang perempuan pada Partai Golkar dan Partai NasDem, sebagai berikut:

1. Fungsi kaderisasi di Partai Golkar dan Partai NasDem yang secara terstruktur (antara lain terdapat silabi, ada divisi yang bertanggung jawab, dilaksanakan rentang waktu tertentu, dan ada output yang diharapkan) dilakukan oleh organisasi induk, yaitu partai politik, bukan oleh organisasi sayap partai
2. Pada Partai Golkar fungsi kaderisasi di partai politik dijalankan tidak ketat, dan dilaksanakan secara terdesentralisasi sehingga ada di semua tingkatan kepengurusan. Kebersertaan kaderisasi bukan sebagai syarat mutlak untuk pencalonan. Sedangkan pada Partai NasDem kaderisasi lebih ketat, dilaksanakan secara tersentral hanya oleh DPP, dan seperti halnya di Partai Golkar kebersertaan kaderisasi bukan sebagai syarat mutlak untuk pencalonan
3. Organisasi sayap partai bidang perempuan di Partai Golkar dan partai NasDem melakukan fungsi membantu partai politik melakukan pendidikan politik yang tidak

terstruktur, yakni dikemas dalam kegiatan seminar/lokakarya/diskusi, bakti sosial, berdurasi pendek, bisa spontanitas dan segmented (sesuai karakteristik anggota)

4. Sifat kaderisasi di organisasi sayap terbukasesuai dengan fungsi utamanya untuk memperluas anggota
5. Hambatan organisasi sayap dalam melakukan fungsi kaderisasi karena keterbatasan wewenangnya, sehingga berimplikasi pada banyak hal, seperti hanya melaksanakan program partai, atau program pengurus pusat organisasi sayap, bersifat sporadis dan tidak terencana dan ada keterbatasan/hambatan pendanaan.
6. Pada kasus Kota Semarang kaderisasi oleh Partai Golkar dan Parta NasDem, termasuk organisasi sayap bidang perempuan gagal mengantarkan perolehan kursi yang signifikan dan keterpilihan perempuan.

Hambatan yang dihadapi oleh sayap partai perempuan Partai Golkar dan Partai NasDem Kota Semarang dalam kaderisasi politik

Partai Golkar yang merupakan salah satu Partai yang sudah lama berdiri di Indonesia secara jumlah kader atau anggota dapat dikatakan banyak tersebar di seluruh daerah, salah satunya di Kota Semarang, dengan demikian proses kaderisasi yang dilakukan oleh Partai Golkar memang lebih berfokus kepada peningkatan loyalitas kader atau anggota sehingga peran penting sayap Partai sangat diperlukan untuk dapat menjangkau semua elemen di masyarakat.

Proses kaderisasi Partai Nasdem Kota Semarang melalui sayap partai Grada Wanita Malahayati tidak berjalan maksimal. Faktor-faktor penyebabnya dirangkum dari uraian di atas sebagai berikut:

1. Kaderisasi yang terstruktur dilaksanakan oleh DPP Partai NasDem melalui lembaga ABN. Sedangkan fungsi organisasi sayap adalah melaksanakan kebijakan yang menjadi garis partai dan di internalnya punya wewenang untuk membuat kegiatan sesuai bidangnya, sifatnya tidak terstruktur.
2. kaderisasi oleh Partai NasDem yang terpusat terbuka bagi semua anggota sepanjang diusulkan oleh pengurus partai setiap tingkatan dan masih memenuhi syarat batas maksimal usia. tetapi kuotanya terbatas menjadikan tidak semua kader bisa mengikuti, sementara bagi kader perempuan peran peran organisasi sayap Garda Malahati belum

terlembaga, tidak terstruktur dan spontan (tidak terencana), selain karena keterbatasan anggaran, terjadinya kekosongan jabatan ketua di kepengurusan DPW Garda Wanita Malahayti dan sebagai jalan tengah dirangkap oleh Ketua DPD Garda Wanita Malahayati Kota Semarang, ikut mengganggu tugas-tugasnya.

Partai NasDem Kota Semarang berhasil mencalonkan perempuan untuk Pemilu DPRD Kota Semarang sebesar 20% dan sejumlah kader di posisi nomor urut kecil, akan tetapi belum meraih kursi yang cukup untuk berdiri sebagai satu fraksi. Di Pemilu 2014 (sebagai partai baru) hanya meraih satu kursi (2%) dari 50 kursi DPRD dan di Pemilu 2019 meraih dua kursi (4%), semuanya diisi kader laki-laki.

V. PENUTUP

Kesimpulan

1. Pola kaderisasi melalui organisasi sayap bidang perempuan pada Partai Golkar dan Partai NasDem menunjukkan kemiripan, sebagai berikut:
 - a. Kewenangan fungsi kaderisasi oleh organisasi sayap bidang perempuan lebih difokuskan pada upaya memperluas anggota, dalam hal ini anggota perempuan
 - b. Fungsi kaderisasi utama pada Partai Golkar dan Partai NasDem oleh organisasi induk. Kaderisasi yang dilaksanakan oleh partai politik ini terstruktur, sementara kaderisasi oleh organisasi sayap bidang perempuan tidak terstruktur.
2. Hambatan organisasi sayap bidang perempuan dalam melaksanakan fungsi kaderisasi berpangkal pada terbatasnya wewenang, sehingga berimplikasi pada banyak hal, seperti aktivitas hanya melaksanakan program partai, atau program pengurus pusat organisasi sayap, aktivitasnya secara sporadis dan tidak terencana, dan ada keterbatasan/ hambatan pendanaan.
3. Kaderisasi oleh Partai Golkar dan Partai NasDem Kota Semarang, termasuk oleh organisasi sayap bidang perempuan berjalan tidak maksimal, sehingga gagal mengantarkan perolehan kursi yang signifikan dan gagal mengantarkan keterpilihan perempuan pada Pemilu DPRD Kota Semarang.
4. Peneliti tidak menemukan adanya pola kaderisasi yang dilakukan oleh Partai Golkar dan NasDem melalui sayap partai perempuan.

Saran

1. Partai politik sesuai dengan fungsinya melakukan fungsi kaderisasi Kaderisasi yang dimaksud adalah yang terlembaga, yakni ada silabi, ada divisi yang bertanggung jawab, ada periode waktu dan rentang waktunya, serta output yang diharapkan. Oleh karena partai bersifat nasional, maka di daerah ada pengurus wilayah/daerah dan fungsi kaderisasi ini didesentralisasikan agar cakupannya luas, dan ada kontrol kualitas oleh DPP.
2. Keberadaan organisasi sayap yang anggotanya segmented pada karakteristik sosial atau kepentingan kelompok tertentu akan lebih luwes dalam memperluas jumlah anggota yang masuk segmen tersebut, agar diberi ruang untuk melakukan fungsi kaderisasi dengan format lebih sederhana. Selanjutnya partai politik sesuai tingkatannya memastikan kegiatan di organisasi sayap tersebut terlaksana melalui suatu perencanaan dan pendanaan yang baik
3. Kebersertaan dalam kaderisasi dalam partai politik atau melalui organisasi sayap menjadi salah satu syarat yang dihitung dalam pencalonan dengan cara melalui pemberian skoring.
4. Penelitian ini diharapkan dapat diteliti lebih lanjut oleh peneliti selanjutnya dengan meneliti di wilayah yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Partai Politik 2008, Jakarta, 2008, Pasal 1, Ayat 1.

Undang-undang Partai Politik Nomor 2, Jakarta, 2011, Pasal 12, Ayat 10.

Triwidaryanta, Jaka 2008, *Modul Pengkaderan Partai Politik*, Strategic Transformation Institute, Yogyakarta

Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Jakarta.

Moeleong, J. Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Sugiyono. 2013. *Metode penelitian kualitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta.

Haris, Syamsuddin dkk. 2016. *Panduan Rekrutmen Dan Kaderisasi Partai Politik Ideal Di Indonesia, Prinsip Kaderisasi*, (Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan Pusat